

DAFTAR PUSTAKA

- Annan, Kofi. *Deepening Democracy: A Strategy for Improving the Integrity of Elections Worldwide: The Report*. Zurich: The Global Commission on Elections, Democracy and Security, 2018.
- Arifulloh, A. “Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat.” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 3, no. 3 (2016): 301–311.
- Arshad, S. A., Ullah, M. R., Butt, M. F., Hussain, M., & Haider, M. (2025). The role of electoral laws in promoting good governance and ensuring true democracy. *The Critical Review of Social Sciences Studies*, 3(1), 3727-3743.
- Baharuddin, A., dan A. Fadil. “Efektivitas Penyelesaian Sengketa oleh Bawaslu Kabupaten Luwu terhadap Kasus Rekomendasi Ganda Partai Politik pada Pilkada Luwu Tahun 2018.” *Journal of Lex Generalis (JLG)* 2, no. 8 (2021): 2228–2243.
- Bawaslu Kabupaten Kendal. *Laporan Tahunan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Tahun 2024*. Kendal: Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kendal, 2025.
- Beetham, David. *The Legitimation of Power*. London: Palgrave Macmillan.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Catt, Helena. *Electoral Management Design*. Revised ed. Stockholm: International IDEA, 2014.
- Cehovin, E. *Code of Conduct for the Ethical and Professional Administration of Elections*. Stockholm: International IDEA, 2001.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Djafar, T. M. *Krisis Politik dan Proposisi Demokratisasi: Perubahan Politik Orde Baru ke Reformasi*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.
- Fahmi, Khairul. “Penentuan Sistem Pemilihan Umum Anggota Legislatif.” *Jurnal Konstitusi* (2010): 119–160.
- Gaffar, Afan. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

- Handoyo, E., dan P. Lestari. *Pendidikan Politik*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2017.
- Harmoko, R., & Afif, Z. (2021). Peranan Badan Pengawasan Pemilu Terhadap Sengketa Pemilu Tahun 2019 (Studi Di Kantor Bawaslu Kabupaten Batubara). *Jurnal Pionir*, 7(1).
- Hariyono, T., & Arifin, M. (2021). Strategi Komunikasi Politik Bawaslu Kabupaten Tuban Dalam Pencegahan Sengketa Pilkada 2020 Era Pandemi Covid-19. *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam*, 6(1), 79-88.
- Hidayat, N., & Febriansyah, R. (2024). Penerapan good government dan electoral governance studi demokrasi indonesia pada penyelenggaraan pilkada tahun 2024. *Jurnal Inovasi Daerah*, 3(2), 116-126.
- Hilman, Y. A., K. Khoirurrosyidin, dan N. Lestarini. “Peta Politik Pemilukada Kabupaten Ponorogo 2020 di Tengah Pandemi Covid-19.” *Politicon: Jurnal Ilmu Politik* 2, no. 2 (2020): 122–148.
- Hutapea, B. “Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.” *Jurnal Rechts Vinding* 4, no. 1 (2015): 1–20.
- International IDEA. *Electoral Justice System: An Overview of the International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA, 2010.
- . *Standar-Standar Internasional untuk Pemilihan Umum: Pedoman Peninjauan Kembali Kerangka Hukum Pemilu*. Stockholm: International IDEA, 2022.
- Irawan, B. B. “Perkembangan Demokrasi di Indonesia.” *Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat* (2007): 54–64.
- Joseph, O., dan F. McLoughlin. *Electoral Justice Assessment Guide*. Stockholm: International IDEA, 2019.
- Katherine Ellena dan Chad Vickery (2018) melalui karyanya *Elections on Trial: The Effective Management of Election Disputes and Violations*.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kendal. “Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal Tahun 2024.” Diakses 21 September 2025. <https://kab-kendal.kpu.go.id/blog/read/daftar-pasangan-calon-pemilihan-bupati-dan-wakil-bupati-kendal-tahun-2024>.
- Lestari, D. “Dinamika Politik Lokal dan Independensi Penyelenggara Pemilu.” *Jurnal Politik Indonesia* (2023).

- Lijphart, Arend. *Patterns of Democracy*. New Haven: Yale University Press.
- López-Pintor, Rafael, dan Pippa Norris, eds. *Electoral Engineering*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mahpudin, M. “Konflik Pemilu: Dinamika Sengketa Calon Perseorangan dalam Kontestasi Elektoral di Kabupaten Lebak.” *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5, no. 2 (2020): 98–117.
- Mozaffar, Shaheen, dan Andreas Schedler. “The Comparative Study of Electoral Governance.” *International Political Science Review* (2002).
- Mufidah, L. “Eksistensi Peraturan Kepala Daerah sebagai Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah.” *Badamai Law Journal* 2, no. 1 (2017): 59–78.
- Mulyana, Deddy. *Komunikasi Politik: Membedah Visi dan Gaya Komunikasi Praktisi Politik*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Norris, Pippa. *Why Elections Fail*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.
- Noviati, C. E. “Demokrasi dan Sistem Pemerintahan.” *Jurnal Konstitusi* (2013): 333–354.
- Orozco-Henríquez, J., et al., eds. *Electoral Justice: The International IDEA Handbook*. Stockholm: International IDEA, 2010.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020.
- Perdana, Aditya, et al. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Jakarta: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019.
- Pranoto, E. *Efektivitas Hukum dalam Mengatasi Risiko Pemilu*. Semarang: Universitas 17 Agustus, 2025.
- Prasetya, A. (2016). *Penyelesaian Sengketa Hasil Pemilukada Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013* (Doctoral dissertation, UIN SUNAN KALIJAGA).
- Pratama, R., dan M. Siregar. “Independensi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu.” *Jurnal Hukum Tata Negara* (2022).

- Pratama, S. M., Nurlela, E., & Sitepu, H. G. D. (2021). Gagasan Pembentukan Peradilan Khusus Pilkada Dalam Mewujudkan Electoral Justice. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(01), 14-24.
- Putra, Fadillah. *Partai Politik dan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Rosana, E. "Negara Demokrasi dan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Tapis* (2016): 37–53.
- Sanit, Arbi. *Sistem Politik Indonesia: Kestabilan, Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Saputra, M. R. Y. (2019). Rekonseptualisasi Wewenang Ajudikasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa Proses Pemilukada Oleh Bawaslu. *Jurnal Legislatif*, 57-67.
- Sardini, Nur Hidayat. *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu*. Jakarta: LP2AB, 2015.
- Sari, W. (2023). Problematika Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pilkada: Antara Kepastian Hukum Dan Inkonsistensi. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 3(1), 5.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suparto, S., Chaidir, E., Ardiansyah, A., & Santos, J. G. (2023). Establishment of Electoral Court in Indonesia: Problems and Future Challenges. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 8(2), 501-544.
- Supriyadi, Supriyadi. "Rekonseptualisasi Penyelesaian Sengketa Proses Pencalonan Pilkada." *Jurnal Hukum & Pembangunan* Vol 51.1 (2021): 110-123.
- Surbakti, Ramlan, Didik Supriyanto, dan Topo Santoso. *Penanganan Sengketa Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011.
- Sensu, L., Tatawu, G., Sinapoy, M. S., Haris, O. K., Safiuddin, S., & Gafur, M. (2022). Analisis Kewenangan Adjudikasi Bawaslu dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. *Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 308-321.
- Syamsuadi, A., dan M. R. Yahya. "Model Kandidasi Birokrat oleh Partai Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2015." *Journal of Governance* 3, no. 2 (2018): 133–153.

Taagepera, R. (1998). How electoral systems matter for democratization. *Democratization*, 5(3), 68-91.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Widodo, B. E. C. (2016). Penyelesaian Sengketa Pilkada Serentak 2015 dalam Perspektif Electoral Justice System. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 2(1), 9-23.

Widodo, H., & Prasetyo, D. E. (2021). Penataan Penataan Kewenangan KPU dan Bawaslu dalam Melakukan Pengawasan dan Menangani Sengketa Proses Pemilu. *Perspektif Hukum*, 200-221.